



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Politik

Senin, 22 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. RPJMN PEMERINTAH BARU HARUS FOKUS PEMBENAHAN STRUKTURAL (*Media Online Indonesia Finance Today*)

RPJMN PEMERINTAH BARU HARUS FOKUS PEMBENAHAN STRUKTURAL



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & IOS
di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan
koran Indonesia Finance Today
hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 22 September 2014

Halaman 7, Kolom 1-5

RPJMN Pemerintah Baru Harus Fokus Pembenaan Struktural

Dusep Malik

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global dan banyaknya masalah struktural diakui pemerintah sebagai pemicu tidak tercapainya beberapa target penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 di akhir masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Lukita Dinarsyah Towa, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan ketidakpastian ekonomi global diakui tidak tampak saat penyusunan RPJMN 2010-2014 lalu, sehingga ke depan pemerintah baru diharapkan bisa belajar dari pengalaman ini.

Menurut Lukita, dampak dari fenomena global tersebut bisa diatasi dengan baik bila kondisi dalam negeri diperbaiki, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang saat ini sudah diakselerasi pemerintah melalui pencaangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Akselerasi tersebut diakui perlu pembenahan di berbagai sisi seperti regulasi, izin-izin, dan pembebasan lahan. Pembenahan tersebut diharapkan tidak lagi menggunakan pola-pola lama tetapi harus mengedepankan terobosan baru yang tentunya lebih berpihak terhadap masyarakat.

"Kita mengakui kondisi eksternal saat ini tidak seperti waktu pemerintah menyusun RPJMN 2010-2014 lalu, ini bukan sekedar alasan karena memang fenomena global ini tentunya akan sangat berpengaruh dari kondisi di dalam negeri sendiri, untuk itu fokus dalam negeri harus dilakukan pemerintah

baru," jelasnya kepada IFT.

Selain itu, Lukita juga melihat dalam menyusun RPJMN lima tahun ke depan pemerintah baru perlu melihat tantangan dari ketahanan energi nasional. Pasalnya, masalah tersebut terlihat jelas dampaknya akhir-akhir ini terhadap fiskal dan neraca pembayaran, terlebih pemerintah baru menginginkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Ke depan, dalam menjawab tantangan energi pemerintah baru harus melakukan bauran energi yang tidak bertumpu terhadap energi fosil, baik itu untuk transportasi maupun untuk tenaga listrik. Seperti mengalihkan penggunaan gas dan geothermal untuk listrik. Upaya itu harus dilakukan dari sekarang dan memperbaiki regulasinya.

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan dalam lima tahun pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7% - 7,7% di akhir 2014, tingkat pengangguran sebesar 5% - 6% dan kemiskinan 8% - 10%. Namun, realisasinya target pertumbuhan hanya tercapai pada dua tahun pertama yaitu 2010 dan 2011, angka kemiskinan kembali naik pada akhir 2013 dan angka pengangguran berpotensi stagnan.

Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya mengungkapkan dalam upaya menyusun RPJMN lima tahun ke depan pemerintah baru tentu perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan perbaikan pendidikan, terjaganya swasembada pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas sarana infrastruktur, turunya kesenjangan, dan menekan praktek korupsi.



Pemerintah menyatakan melesetnya target penurunan angka pengangguran disebabkan faktor eksternal.

Menurut dia, semua upaya tersebut dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2010-2025 sebesar 6% - 8% per tahunnya dan mendorong pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi US\$ 7 ribu pada 2019.

Selain itu, dengan menggunakan landasan pembangunan tersebut diharapkan Indonesia dengan cepat meningkat dari negara berpendapatan menengah ke negara maju atau ke luar dari jebakan kelas

menengah atau yang sering disebut *middle income trap*.

Keterlibatan Swasta

Sementara itu, Josua Pardede, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), mengatakan dalam RPJMN lima tahun ke depan pemerintah perlu fokus pada infrastruktur. Sebab, infrastruktur yang baik akan mendorong investasi dan meningkatkan ekspor yang pada akhirnya mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, agar infrastruktur tersebut bisa terbangun di tengah

keterbatasan anggaran, pemerintah perlu membuat aturan yang lebih baik agar ada keikutsertaan swasta, baik itu melalui *Public Private Partnership* (PPP) atau swasta murni untuk pembangunan infrastruktur besar dan strategis.

"Fokus ke infrastruktur itu penting lima tahun ke depan, sebab infrastruktur baik investasi masuk dan ekspor tumbuh, lalu pertumbuhan ekonomi juga akan sesuai target yaitu 7%. Semua itu, juga perlu didukung iklim investasi yang kondusif, daya beli terjaga dan inflasi yang *manageable*," pungkasnya. ●

Ketidakpastian ekonomi glonal dan banyaknya masalah struktural diakui pemerintah sebagai pemicu tidak tercapainya beberapa target penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #RKP(RencanaKerjaPemerintah) #RPJMN(RencanaPembangunan JangkaMenengah)

#MP3EI(MasterplanPercepatandanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia)